

ISI PETITUM GUGATAN TERHADAP GIBRAN DAN KPU:

1. Mengabulkan gugatan dari penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan tergugat I dan tergugat II bersama-sama telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibatnya.
3. Menyatakan tergugat I tidak sah menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029
4. Menghukum para tergugat secara tanggung renteng membayar kerugian materiel dan imateriel kepada penggugat dan seluruh warga negara Indonesia sebesar Rp 125.000.010.000.000 (Rp 125 triliun) dan disetorkan ke kas negara
5. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), meskipun ada upaya hukum banding, kasasi dari para tergugat.
6. Menghukum para tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 100.000.000 setiap hari atas keterlambatannya dalam melaksanakan putusan pengadilan ini.
7. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

EDISI SELASA, 16 SEPTEMBER 2025

H A R I A N

LENTERA

Inspirasi Perubahan

02 GOVERNMENTTODAY
Apa Itu Paket Stimulus Ekonomi
8+4+5 ?

04 NUSANTARA
Tambahkan Anggaran Ditolak,
Tahap II IKN Bisa Mangkrak

10 LISTSTYLE
Mix & Match Korset ala
Fashionista Modern

GIBRAN DIGUGAT RP125 T, HASILNYA UNTUK WARGA

Subhan Palal mengajukan gugatan perdata terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan KPU RI. Gugatan itu terkait ijazah pendidikan menengah atas yang digunakan Gibran dalam pencalonan pada pemilihan presiden 2024 yang dinilai sebagai dokumen berupa sertifikat dari sekolah di Singapura. Subhan menilai bahwa Gibran tidak pernah menjalani sekolah SMA/ sederajat yang diselenggarakan berdasarkan hukum RI, sehingga tidak memenuhi syarat dalam pendaftaran cawapres pada Pilpres lalu. Atas gugatan tersebut, Subhan sebagai penggugat meminta majelis hakim menghukum Gibran dan KPU membayar kerugian materiel dan imateriel sebesar Rp 125 triliun. Penggugat meminta uang itu disetorkan ke kas negara. Subhan Palal, berjanji akan menyetorkan uang tersebut ke kas negara bila gugatannya dikabulkan. Menurutnya semua warga negara

menjadi korban dalam kasus ijazah Gibran sehingga uang hasil gugatan sudah seharusnya masuk ke kantong negara. Bahkan, Subhan mengatakan dengan uang sebanyak itu maka bisa digunakan untuk seluruh warga Indonesia. Tentu, lanjutnya, warga sangat membutuhkan uang tersebut, terlebih lagi dalam kondisi ekonomi lemah yang saat ini terjadi di Indonesia. Gugatan ini sudah menjalani dua kali persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sidang perdana Gugatan terdaftar dengan nomor perkara: 583/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst diadili oleh ketua majelis hakim Budi Prayitno dengan anggota Abdul Latip dan Arlen Veronica pada Senin (8/9/2025) lalu. Kemudian sidang kedua digelar Senin (15/9/2025). Namun, Majelis hakim menunda sidang itu karena kuasa hukum Gibran tidak membawa fotokopi KTP Gibran, sehingga tidak memenuhi legal standing atau kedudukan hukum tergugat.



IJASAH

BACA HAL 11...

APA ITU PAKET STIMULUS EKONOMI 8+4+5 ?

Pemerintah akan memberlakukan Program Paket Kebijakan Stimulus Ekonomi pada 2025. Program ini dikenal program paket stimulus ekonomi 8+4+5 karena terdiri dari delapan program akselerasi ekonomi 2025, empat program berlanjut pada 2026, dan lima program andalan pemerintah untuk menyerap tenaga kerja.

“**T**adi hadir bersama bapak presiden membahas terkait dengan kebijakan yang akan diambil yang kita beri nama Program Paket Ekonomi 2025 ini yang terdiri delapan program akselerasi 2025 dan empat program dilanjutkan di 2026, dan lima program terkait kendaraan pemerintah untuk tenaga kerja,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers usai Rapat Kabinet dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/9/2025).

Untuk paket ekonomi 2025 yang akan dikurcurkan hingga akhir tahun itu terdiri dari delapan program, yang pertama yakni program magang lulusan perguruan tinggi yang akan mendapat uang saku setara upah minimum provinsi sekitar Rp 3,3 juta per bulan selama enam bulan.

“Pertama, magang lulusan dari pada perguruan tinggi dengan kriteria maksimal fresh graduate 1 tahun, baik S1, D3, dan yang lain, itu di link and match dengan sektor industri, dengan penerima manfaat awal 20.000 orang,” kata Airlangga.

Menurut Airlangga, jumlah penerima manfaat tahap pertama sebanyak 20 ribu orang. Selama proses bekerja, mereka diberikan uang saku sebesar upah minimum provinsi (UMP). “Dan ini untuk enam bulan dan anggarannya sudah disediakan sebesar Rp 198 miliar,” ujar Airlangga.

Kemudian program yang kedua adalah program perluasan pajak penghasilan pasal 21 ditanggung pemerintah yang ditambah untuk sektor terkait pariwisata sebesar 100% selama tiga bulan di sisa tahun pajak 2025. Selanjutnya, yang ketiga, program bantuan pangan periode Oktober-November 2025 dengan total 10 Kg beras, dan bisa ditambah pada Desember jika realisasi anggaran

belum optimal. “Nanti kita evaluasi untuk bulan berikutnya Desember, itu diperlukan dana sebesar Rp7 triliun,” katanya.

Keempat adalah berupa bantuan iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan kematian (JKM) untuk 6 bulan sebesar 50% bagi pekerja bukan penerima upah, yang di antaranya ialah mitra pengemudi transportasi online atau ojol, ojek pangkalan, supir, kurir, dan logistik. **T a r g e t** penerimanya ada sekitar 731,3 ribu orang.

K e l i m a, program manfaat layanan tambahan (MLT) perumahan B P J S Ketenagakerjaan berupa relaksasi manfaat bunga KPR/KPA/PUMP/PP maksimum BI Rate plus 3%. Keenam, program padat karya tunai atau cash for work melalui Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum dalam bentuk upah harian dengan proyek periode September-Desember 2025. Ketujuh, dalam bentuk percepatan aturan deregulasi yang termuat dalam Peraturan Pemerintah (PP) 28 Tahun 2025.

Terakhir, atau kedelapan, bentuknya berupa program perkotaan, untuk perbaikan kualitas pemukiman dan penyediaan platform pemasaran untuk gigs economy khususnya UMKM. Total anggaran paket ekonomi yang terdiri dari



delapan program itu senilai Rp 16,23 triliun.

Adapun untuk empat program yang dilanjutkan pada 2026 di antaranya yang pertama perpanjangan waktu pemanfaatan Pph Final 0,5% bagi wajib pajak UMKM serta penyesuaian penerima PPh Final 0,5% bagi wajib pajak UMKM. “Jadi kita tidak perpanjang satu tahun, satu tahun, tapi diberi kepastian sampai 2029. Kemudian alokasinya di 2025 sudah Rp2 triliun,” jelas Airlangga.

Kedua, perpanjangan PPh 21 DTP untuk pekerja di sektor terkait pariwisata. “Dengan estimasi anggarannya Rp480 miliar dengan gaji di bawah Rp10 juta.”

Kemudian yang ketiga adalah PPh Pasal 21 DTP untuk pekerja di Industri Padat Karya. Terakhir, yang keempat adalah berupa program diskon iuran JKK dan JKM untuk semua penerima bukan penerima upah atau BPU.

Sementara itu, untuk lima program penyerapan tenaga kerja berupa operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, replanting di perkebunan rakyat, kampung nelayan merah putih, revitalisasi tambak panturan, dan modernisasi kapal nelayan.

Untuk paket penyerapan tenaga kerja dari program, unggulan Presiden Prabowo Subianto adalah Kopdes Merah Putih sebanyak 80.000, yang diperkirakan menyerap 681 ribu tenaga kerja, dengan targetnya mencapai 1 juta orang di Desember 2025. (ist,han/lut)

8 Program Akselerasi Ekonomi 2025:

- Program magang lulusan perguruan tinggi (maksimal fresh graduted 1 tahun)
- Perluasan pph pasal 21 DTP untuk pekerja di sektor terkait pariwisata
- Bantuan pangan periode Oktober-November 2025
- Diskon Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi BPU transportasi online/ojol (termasuk ojek pangkalan, supir, kurir, dan logistik) selama 6 tahun
- Program Manfaat Layanan Tambahan (MLT) Perumahan BPJS Ketenagakerjaan
- Program Padat Karya Tunai (cash for work) Kemenhub dan KemenPu
- Program Deregulasi Implementasi PP28/2025
- Program Perkotaan (Pilot Project DKI Jakarta) perbaikan kualitas pemukiman dan penyediaan platform pemasaran dan Gigs

4 Program Dilanjutkan Pada 2026:

- Perpanjangan jangka waktu pemanfaatan PPh Final 0,5% bagi Wajib Pajak UMKM Tahun 2026 serta Penyesuaian Penerima PPh Final 0,5% bagi Wajib Pajak UMK.
- Perpanjangan PPh 21 DTP untuk Pekerja di Sektor terkait Pariwisata (APBN 2026)
- PPh Pasal 21 DTP - untuk Pekerja di Industri Padat Karya (APBN 2026)
- Program Diskon iuran JKK dan JKM untuk semua penerima Bukan Penerima Upah (BPU)

5 Program Penyerapan Tenaga Kerja:

- Operasional KDKMP (Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih)
- Replanting di Perkebunan Rakyat
- Kampung Nelayan Merah Putih
- Revitalisasi Tambak Pantura
- Modernisasi Kapal Nelayan.



Tentunya sepanjang tidak melanggar aturan, tidak mengganggu kenyamanan, keindahan, maka penggunaan media-media publik untuk menyampaikan sebuah pesan tentu sebuah hal yang lumrah,”

Airlangga Hartarto

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

KOMISI XIII : POS BANTUAN HUKUM HARUS DIPERBANYAK

Wakil Ketua Komisi XIII DPR, Sugiat Santoso, mengatakan pos bantuan hukum seharusnya berada di seluruh desa untuk memberikan layanan hukum secara mudah dan terjangkau. Untuk itu dia meminta Kementerian Hukum memperbanyak pos tersebut di seluruh daerah.

Terlebih lagi, lanjut Sugiat, Pos Bantuan Hukum merupakan organisasi bantuan hukum resmi yang dimiliki pemerintah. Sehingga, masyarakat dapat merasakan bantuan hukum gratis dari pemerintah.

Namun demikian, Sugiat menambahkan bahwa nyatanya tidak semua wilayah memiliki Pos Bantuan Hukum. Karena itulah Komisi XIII DPR RI mengharapakan Kementerian Hukum memberikan tanggapan serius atas permintaan tersebut.

"Kemarin kita kunjungan kerja spesifik Komisi 13 ke beberapa daerah. Itu kanwil-kanwil hukum keluhannya sama bahwa ada keterbatasan anggaran untuk membentuk organisasi bantuan hukum atau pos bantuan hukum," kata Sugiat saat menggelar rapat membahas anggaran dengan Kementerian Hukum di gedung Parlemen, Senin (15/9/2025).

Kini, Kementerian Hukum tengah menyusun anggaran untuk direalisasikan pada tahun 2026 mendatang. Dia berharap anggaran tersebut dapat memfasilitasi pengadaan Pos Bantuan Hukum di seluruh Indonesia.

Pendapat serupa juga dikatakan anggota Komisi XIII yang lain, Vita Ervina. Menurut politisi partai PDI Perjuangan ini banyak program-program kerakyatan yang bisa dilakukan Kementerian Hukum seperti memberikan akses pelayanan hukum yang mudah dan murah. Tidak hanya itu, masyarakat juga membutuhkan ragam program bantuan hukum agar mudah mendapatkan keadilan.

Salah satu program yang harus dijalankan Kementerian Hukum dengan maksimal yakni Pos Bantuan Hukum di desa-desa. "Kami tentu berharap ada pembangunan seperti program Pos Bantuan hukum di desa-desa bisa segera dilaksanakan dan diperbanyak," kata Vita.

"Tentunya kegiatan lain yang

dalam rangka memperkuat digitalisasi dan layanan hukum yang harapannya untuk meningkatkan pelayanan publik di daerah-daerah ini bisa dirasakan masyarakat," tambah dia dilansir antara.

Dia mengaku tidak menolak penambahan anggaran sebesar Rp196 miliar yang akan diterima Kementerian Hukum. Namun, anggaran tersebut tidak hanya untuk kebutuhan operasional kementerian.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Dewi Asmara menekankan pentingnya menjaga alokasi anggaran bagi program transformasi digital di lingkungan Kementerian Hukum. Menurutnya, penguatan infrastruktur digital menjadi krusial sebagai wujud kehadiran negara dalam memberikan pelayanan hukum yang efektif.

"Kalau masih memungkinkan, kita perlu mempertimbangkan pergeseran beberapa pos agar kekurangan anggaran tidak berpengaruh besar terhadap teknologi digital, karena itu menjadi tulang punggung pelayanan hukum," ujar Dewi Asmara.

Komisi XIII DPR RI kemudian menyetujui hasil pembahasan pagu anggaran Kementerian Hukum tahun 2026 yang semula sebesar Rp4,025 triliun ditambah pagu tambahan Rp196 miliar. Dengan demikian, total pagu anggaran Kementerian Hukum tahun 2026 menjadi Rp4,221 triliun.



Wakil Ketua Komisi XIII DPR, Sugiat Santoso

Keputusan ini selanjutnya akan disampaikan kepada Badan Anggaran DPR RI dan pemerintah untuk ditetapkan dalam UU APBN 2026.

Dewi menambahkan, Komisi XIII DPR RI tetap akan melakukan pendalaman bersama Eselon I Kementerian Hukum dalam rangka fungsi pengawasan. "Pendalaman diperlukan untuk memastikan sinkronisasi program dengan arah kebijakan nasional, efektivitas alokasi anggaran, peningkatan PNPB, serta akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi pada tahun anggaran 2026," ucapnya.

Sementara itu, Anggota Komisi XIII

DPR RI, Meity Rahmatia menekankan pentingnya efisiensi belanja dan orientasi anggaran yang berfokus pada dampak nyata bagi masyarakat. "Saya mengharapkan anggaran sebesar ini tidak hanya terserap untuk belanja pegawai, tapi betul-betul memberi dampak nyata terhadap pelayanan hukum masyarakat," ujarnya.

Sebelumnya mengusulkan pagu indikator sebesar Rp6,36 triliun, namun setelah penyesuaian ditetapkan sebesar Rp3,9 triliun, dan akhirnya disepakati menjadi Rp4,2 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp3,19 triliun atau hampir 80% dialokasikan untuk program Dukungan

Manajemen.

Dalam kesempatan tersebut, Meity turut menyoroti target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp2,132 triliun, yang dikhawatirkan dapat berdampak pada naiknya tarif layanan hukum, termasuk tarif jasa notaris yang

semakin mahal.

"Bagaimana strategi agar target PNPB ini tidak membebani Masyarakat. Kita tidak ingin akses terhadap hukum menjadi hak eksklusif karena biaya yang tidak terjangkau," tegasnya.

Terkait program prioritas nasional, ia menyoroti alokasi Rp50,1 miliar untuk bantuan hukum litigasi dari total Rp843 miliar untuk 20 output prioritas nasional, termasuk pembentukan Pos Bantuan Hukum Desa. Mengakhiri pernyataannya, Anggota Komisi XIII tersebut kembali menekankan pentingnya efisiensi dalam belanja dukungan manajemen dan menuntut agar lebih fokus pada pelayanan langsung kepada masyarakat.

Sementara itu, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej menjelaskan, anggaran Kementerian Hukum tahun 2026 sebesar Rp4,221 triliun tersebut terbagi untuk delapan unit Eselon I. Rinciannya, antara lain: Sekretariat Jenderal Rp2,2 triliun; Inspektorat Jenderal Rp31,54 miliar; Ditjen Peraturan Perundang-undangan Rp75,08 miliar; Ditjen Administrasi Hukum Umum Rp776,93 miliar; Ditjen Kekayaan Intelektual Rp597,74 miliar; Badan Pembinaan Hukum Nasional Rp118,47 miliar; Badan Strategi Kebijakan Hukum Rp331,49 miliar; dan BPSDM Hukum Rp164,03 miliar.

Edward menegaskan, alokasi tersebut akan difokuskan untuk memenuhi kebutuhan dasar kelembagaan, layanan publik, reformasi birokrasi, serta penguatan literasi dan layanan hukum di pusat maupun daerah.

"Penyesuaian anggaran ini merupakan hasil pembahasan dengan Badan Anggaran DPR RI, dan kami pastikan penggunaannya akan mendukung tata kelola kelembagaan hukum yang akuntabel, modern, serta dekat dengan masyarakat," kata Edward.

Dengan persetujuan ini, Komisi XIII DPR RI menutup rapat kerja dan menyatakan keputusan rapat akan diteruskan kepada Badan Anggaran DPR RI untuk menjadi bagian dari penetapan dalam RUU APBN 2026. (rls,ant/lut)



Kemarin kita kunjungan kerja spesifik Komisi 13 ke beberapa daerah. Itu kanwil-kanwil hukum keluhannya sama bahwa ada keterbatasan anggaran untuk membentuk organisasi bantuan hukum atau pos bantuan hukum,"

Sugiat Santoso

Wakil Ketua Komisi XIII DPR



Foto udara diambil pada tanggal 15 Agustus 2025, di Taman Kusuma Bangsa di Ibu Kota Nusantara (IKN). (AFP)

TAMBAHAN ANGGARAN DITOLAK, TAHAP II IKN BISA MANGKRAK

Upaya Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) untuk mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp14,92 triliun dalam APBN 2026 berakhir tanpa restu Badan Anggaran (Banggar) DPR RI. Penolakan itu memunculkan kekhawatiran bahwa sejumlah proyek krusial di tahap kedua pembangunan IKN, khususnya di kawasan legislatif dan yudikatif, terancam mangkrak alias tidak selesai.

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono buka suara soal permintaan tambahan anggaran sebesar Rp 14,92 triliun untuk tahun 2026 yang ditolak Badan Anggaran (Banggar) DPR RI. Hal ini sebelumnya disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin.

Menurut Basuki, tidak disetujuinya permohonan tambahan anggaran berpotensi mempengaruhi progres pembangunan IKN tahap kedua yang fokus pada kawasan legislatif, yudikatif, hingga infrastruktur pendukung. Basuki menyebut penyelesaian proyek IKN bisa mundur dari target.

"Ya, pasti akan mempengaruhi. Bisa mundur lagi," ujar Basuki saat ditemui di Kompleks DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Senin (15/9/2025).

Ekosistem legislatif dan yudikatif di IKN sendiri ditargetkan selesai pada tahun 2028. Hal ini sesuai dengan target Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan IKN menjadi ibu kota politik pada tahun 2028.

Oleh karena itu pembangunan infrastruktur ekosistem yudikatif dan legislatif, baik untuk kantor dan huniannya terus dikerjakan. Basuki menjelaskan, usulan tambahan anggaran itu sebenarnya masuk dalam kerangka anggaran Rp 48,8 triliun untuk pembangunan IKN selama 3 tahun mendatang.

"Sebetulnya anggaran yang diusulkan itu kan (tambahan Rp 14,92 triliun) dalam kerangka Rp 48,8 triliun. Itu untuk menyelesaikan tiga tahun," imbuh Basuki.

Adapun besaran anggaran Rp 48,8 triliun untuk tahap II sudah disetujui oleh Prabowo. Dengan ditolaknya usulan tambahan anggaran oleh Banggar maka besaran anggaran Otorita IKN tahun 2026 tetap sebesar Rp 6,26 triliun.

Dalam rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI, Basuki sempat meminta dukungan legislatif agar bisa tetap mendapat tambahan anggaran untuk tahun depan. Hal ini demi memastikan pengerjaan IKN tahap kedua bisa selesai selama 3 tahun.

"Dengan tugas yang diberikan

kepada kami untuk bisa menyelesaikan pembangunan legislatif dan yudikatif 3 tahun, dan dengan dialokasikan 2026 ini Rp 6,26 triliun kami masih mohon dukungan bapak-bapak pimpinan dan anggota komisi II DPR RI, nantinya masih ada potensi atau kesempatan mengusulkan anggaran belanja tambahan tahun 2026 ini," beber Basuki.

Tadinya, tambahan anggaran sebesar Rp 14,92 triliun akan digunakan untuk mendukung pembangunan beberapa proyek IKN tahap kedua.

Dalam poin kesimpulan, Komisi II DPR RI menyetujui pagu anggaran OIKN tahun 2025 sebesar Rp 6,2 miliar untuk ditetapkan sebagai pagu alokasi

anggaran (pagu definitif) tahun 2025. Sebesar Rp 644 miliar dipakai untuk dukungan manajemen, sementara Rp 5,6 triliun untuk pengembangan kawasan strategis.

Di sisi lain, Ketua Banggar DPR Said Abdullah menegaskan bahwa penolakan tambahan anggaran bukan berarti proyek IKN akan berhenti. "Kami pastikan IKN tidak akan mangkrak. Anggaran untuk IKN selalu ada dalam APBN setiap tahun. Hanya saja, besarnya tentu menyesuaikan kemampuan fiskal negara," katanya. Ia menekankan bahwa pembangunan IKN adalah amanat undang-undang sehingga tidak bisa dibiarkan terbengkalai. (wid,rls,ist/dya)

Pengajuan 5 Mitra Komisi II Juga Tak Direstui

Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menolak usulan tambahan anggaran dari Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) dan sejumlah lembaga mitra Komisi II untuk tahun anggaran 2026. Penolakan itu tertuang dalam surat resmi Banggar DPR RI bertanggal 11 September 2025 yang ditujukan kepada pimpinan Komisi II DPR.

Sebelumnya, dalam rapat kerja bersama Komisi II, terdapat enam instansi yang mengajukan tambahan anggaran. Otorita IKN menjadi yang terbesar dengan usulan Rp 14,92 triliun. Selain itu, Kementerian PANRB mengajukan Rp 80,41 miliar; Badan Kepegawaian Negara (BKN) Rp 500 miliar; Lembaga Administrasi Negara (LAN) Rp 55,6 miliar; Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Rp 148,15 miliar; dan Ombudsman RI sebesar Rp 199,34 miliar.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi Golkar, Zulfikar Arse Sadikin, menegaskan bahwa semua usulan itu telah dibahas bersama Banggar melalui anggota yang berasal dari Komisi II. Namun, keputusan akhir Banggar menyatakan seluruh

permintaan tambahan anggaran ditolak.

"Tidak ada satu pun instansi yang mendapatkan tambahan anggaran. Semua kembali pada pagu yang sudah disepakati dalam pembahasan awal," ujar Zulfikar.

Dengan demikian, pagu anggaran 2026 tetap pada angka semula: Otorita IKN Rp 6,26 triliun, Kementerian PANRB Rp 392,98 miliar, BKN Rp 639,46 miliar, LAN Rp 293,34 miliar, ANRI Rp 279,33 miliar, dan Ombudsman Rp 251,97 miliar.

Adapun dua lembaga lain yang tidak mengajukan tambahan anggaran adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Untuk tahun 2026, KPU memiliki alokasi anggaran Rp 3,53 triliun, sedangkan Bawaslu Rp 2,47 triliun.

Banggar menilai keputusan ini sejalan dengan kondisi fiskal negara serta hasil pembahasan RUU APBN 2026. DPR meminta Komisi II bersama para mitra kerja menyesuaikan program agar tetap berjalan efektif dengan anggaran

RINCIAN RENCANA PEMBANGUNAN TAHAP II IKN

Pembangunan Lanjutan - Rp 4,73 T
Gedung DPR, DPD, MPR, MA, MK, KY, Masjid, Plaza Keadilan, jalan kawasan legislatif-yudikatif, KIPP 1A, manajemen konstruksi (MYC 2025-2027). Sudah mulai 2025 dengan Rp 3,68 T.

Pembangunan Baru - Rp 9,59 T
- Hunian tapak & vertikal (legislatif, yudikatif, ASN, umum) Rp 4,42 T (MYC 2026-2028).
- Jalan KIPP & WP2, SPAM, SDA/irigasi, utilitas & akses kawasan legislatif-yudikatif Rp 5,17 T (MYC 2026-2028).

Pengelolaan - Rp 600 M
Operasi & pemeliharaan kantor presiden, istana, kantor kementerian, air minum, jalan, MUT, RTH, embung, sanitasi, persampahan, dll.



yang tersedia.

Langkah penolakan ini sekaligus memberi sinyal bahwa pemerintah dan lembaga terkait harus lebih fokus pada efisiensi serta optimalisasi penggunaan anggaran tanpa menambah beban belanja negara. (wud,rls,ant/dya)

MENANTI SURABAYA-SIDOARJO TERKONEKSI KRL

Ditarget Rampung 2029, Pendanaan dari Jerman Rp 5,71 T

Indonesia menggandeng Pemerintah Jerman dalam pembangunan Surabaya Regional Railway Line (SRRL) Tahap I. Proyek kereta rel listrik (KRL) ini menjadi bagian dari program prioritas nasional 2025–2029 untuk memperkuat transportasi publik di kawasan aglomerasi Surabaya, Jawa Timur.

Tahap awal proyek ini mencakup elektrifikasi jalur sepanjang 20 kilometer dari Stasiun Gubeng menuju Stasiun Sidoarjo. Total nilai investasi mencapai 296,8 juta euro atau sekitar Rp 5,71 triliun. Dana tersebut terdiri atas pinjaman lunak dari Bank Pembangunan Jerman (KfW) sebesar 230 juta euro, kontribusi pendamping dari Pemerintah Indonesia senilai 66,8 juta euro, serta hibah sebesar 6 juta euro.

Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Kementerian Perhubungan, Arif Anwar, menjelaskan bahwa pembangunan jalur ini menggunakan infrastruktur rel yang sudah ada.

"SRRL akan memanfaatkan jalur eksisting Pasar Turi hingga Sidoarjo. Namun untuk tahap pertama, pinjaman yang disepakati digunakan bagi lintasan Gubeng-Sidoarjo dengan pembangunan jalur ganda," ujarnya di Jakarta, Senin (15/9/2025).

Adapun, proyek SRRL ini direncanakan akan dikerjakan melalui dua tahap yakni tahap 1 (fase A dan B) dan tahap 2. Pada tahap 1 mencakup perbaikan dan peningkatan fasilitas sejumlah stasiun mulai dari stasiun Surabaya Gubeng, Wonokromo, Waru, Gedangan, dan Sidoarjo. Termasuk penanganan perlintasan sebidang serta pembangunan beberapa flyover di sejumlah titik rawan kemacetan dan peningkatan fasilitas sistem persinyalan dan telekomunikasi di sepanjang jalur Depo Sidotopo – Sidoarjo.

Seiring kesepakatan pinjaman yang ditandatangani tahun ini, pemerintah akan memulai tahap kajian teknis pada 2026, termasuk penyusunan desain detail (DED). Selain itu, Depo Sidotopo juga akan dibangun ulang sebagai pusat perawatan kereta. Pekerjaan konstruksi ditargetkan dimulai pada 2029.

Kuasa Usaha Ad Interim Kedutaan Besar Jerman di Jakarta, Thomas Graf, menyebut proyek ini sangat strategis. "SRRL tahap pertama akan menjadi terobosan besar untuk meningkatkan mobilitas masyarakat di kawasan metropolitan Surabaya," ungkapnya. Ia menambahkan, proyek ini selaras dengan agenda transisi ekonomi hijau dan pembangunan kota berkelanjutan di Indonesia.

Pemerintah menargetkan jalur KRL ini bisa melayani lebih dari 200 ribu penumpang setiap hari. Dampaknya tidak hanya pada transportasi, tetapi juga pada penurunan emisi gas rumah kaca yang diproyeksikan hingga 150 ribu ton per tahun pada 2045, serta penciptaan



Rangkaian kereta api memasuki Stasiun Wonokromo, Surabaya, Jawa Timur, dari arah Stasiun Gubeng. (dok.ist)

lapangan kerja baru.

Secara sosial-ekonomi, SRRL diharapkan mengurangi kemacetan, menekan biaya logistik, serta meningkatkan keselamatan perjalanan. Dengan integrasi kereta dan bus, sistem ini akan mendorong konsep transit oriented development (TOD) di kawasan Gerbangkertosusila (Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan).

Jerman sendiri menyatakan bangga dapat mendukung proyek

senilai 236 juta euro ini melalui pinjaman dan hibah. "Ini merupakan investasi penting dalam infrastruktur berkelanjutan, sekaligus mendukung target pertumbuhan ekonomi hijau Indonesia," kata Graf.

Dalam dua tahun pertama beroperasi, SRRL diperkirakan memberi manfaat bagi lebih dari 1,3 juta warga Surabaya dan sekitarnya. Proyek ini juga diyakini akan membantu mendorong pencapaian pertumbuhan ekonomi nasional

Jalur ke Karawang Batal Lagi

JALUR Kereta Rel Listrik (KRL) Commuter Line Jabodetabek sempat direncanakan diperpanjang sampai Karawang. Saat ini Jalur KRL arah Bekasi itu masih berhenti sampai Cikarang.

Rencana perpanjangan jalur KRL ini sudah dijanjikan sejak 2019, dan terakhir sempat dipertegas lagi pada 2024. Namun sampai kini belum ada upaya serius untuk memperpanjang jaringan KRL sampai ke Karawang.

Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (LLKA) DJKA Kemenhub, Arif Anwar, menegaskan sampai saat ini pemerintah tak punya rencana untuk memperpanjang jalur KRL lintas Bekasi sampai ke Karawang.

Sebab menurutnya untuk bisa memperpanjang rute KRL ini, pemerintah harus melakukan pemasangan listrik aliran atas (LAA) alias elektrifikasi di sepanjang rel kereta dari Cikarang hingga Karawang lebih dulu. Dengan begitu rangkaian kereta bertenaga listrik yang dioperasikan oleh KAI Commuter baru bisa melintas.

"Jadi saat ini memang elektrifikasi baru sampai Cikarang,

Rencana untuk ke Karawang saya rasa belum, karena kita harus melakukan elektrifikasi dulu sampai dengan Karawang ya," kata Arif dalam konferensi pers di Kantor Kemenhub, Senin (15/9/2025).

Di sisi lain, menurut Arif hingga saat ini pemerintah belum memiliki dana untuk melakukan elektrifikasi atau pemasangan LAA sampai Karawang. Sebab di luar rencana perpanjangan jalur KRL tersebut, Kemenhub punya program prioritas lain yang memakan cukup banyak anggaran.

"Saat ini kapasitas fiskal kita mungkin belum cukup memenuhi ya kalau kita melakukan elektrifikasi sama dengan ke Karawang. Karena ada program-program lain yang lebih prioritas," jelasnya.

Karenanya hingga saat ini, pengguna layanan KRL yang ingin bepergian dari atau menuju Stasiun Karawang dapat berganti rangkaian dari Commuter Line ke KA lokal. "Dari Cikarang ke Karawang ataupun ke Cikampek ini bisa menyambung dengan kereta lokal," paparnya.

Berdasarkan catatan, Menteri Perhubungan (Menhub) era Presiden

hingga 8 persen.

Ketua Forum Transportasi Jalan dan Perkeretaapian Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Aditya Dwi Laksana, menilai program ini sangat mendesak. "Surabaya merupakan kota terbesar kedua setelah Jakarta, dengan populasi wilayah aglomerasi hampir 10 juta jiwa. Namun, perkembangan perkeretaapian perkotaannya tertinggal dari Jabodetabek maupun Yogyakarta-Solo," jelasnya. (wud,rls,ant/dya)

BEBERAPA JALUR KRL DI INDONESIA

- **JABODETABEK**
- Operator : KAI Commuter
- Panjang Jalur : ± 418 km
- Jumlah Stasiun : 80+
- **YOGYAKARTA – SOLO**
- Operator : KAI Commuter
- Panjang Jalur : ± 60 km
- Jumlah Stasiun : 13
- **BANDARA SOEKARNO-HATTA (JAKARTA)**
- Operator : Railink
- Panjang Jalur : ± 36 km
- Jumlah Stasiun : 6
- **BANDARA KUALANAMU (MEDAN)**
- Operator : Railink
- Panjang Jalur : ± 28 km
- Jumlah Stasiun : 5
- **BANDARA YOGYAKARTA (YIA)**
- Operator : KAI
- Panjang Jalur : ± 40 km
- Jumlah Stasiun : 4
- **SURABAYA – SIDOARJO (RENCANA)**
- Operator : KAI (SRRL)
- Panjang Jalur : ± 20 km (tahap 1)
- Jumlah Stasiun : Belum ditetapkan

ke-7 Joko Widodo atau Kabinet Indonesia Maju, Budi Karya Sumadi sempat menargetkan rute KRL akan bakal diperpanjang sampai Karawang, Jawa Barat (Jabar) pada 2025 atau paling lambat 2026.

"Jadi kalau yang namanya KRL itu adalah secara makro menjadi satu inisiatif dari pemerintah sebagai contoh yang ke arah barat kita sudah lakukan sampai Rangkasbitung. Karawang bisa tahun depan atau 2026," kata Budi kepada wartawan usai rapat dengan Komisi V DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (5/6/2024). (wid,rls,tmo/dya)

REVITALISASI PASAR TUMPANG, DIUSULKAN JADI PUSAT SENI DAN KULINER

MALANG - Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Malang bakal mengusulkan revitalisasi Pasar Tumpang. Dalam konsepnya, pasar yang menjadi salah satu titik transit menuju wisata Gunung Bromo itu akan dikembangkan menjadi pasar seni sekaligus pusat kuliner.

Kepala Disperindag Kabupaten Malang, Nor Fuad Fauzi, menyebut saat ini ada dua pasar di wilayahnya yang membutuhkan program revitalisasi. Dari dua pasar tersebut, satu di antaranya yakni Pasar Lawang yang telah dalam proses pengajuan.

"Pasar Tumpang itu kami rencananya akan mengusulkan untuk revitalisasi. Jadi ada dua pasar di Kabupaten Malang yang perlu direvitalisasi. Satunya di Pasar Lawang, tetapi ini sudah berproses pengajuannya. Kalau Pasar Tumpang ini masih akan kami usulkan," ujar Fuad, dikutip pada Senin (15/9/2025).

Menurutnya, Pasar Tumpang memiliki nilai strategis lantaran menjadi salah satu titik transit wisatawan yang hendak menuju

kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS). Banyak kendaraan jip wisata memilih transit di kawasan pasar tersebut.

"Karena kalau teman-teman mau naik ke Gunung Bromo, itu banyak yang ngetemnya di Pasar Tumpang. Jip-jip wisatawannya itu banyak yang ke sana dulu. Menjadi tempat transit, lah," jelasnya.

Saat ini, Fuad menyebut Disperindag tengah menyiapkan konsep revitalisasi secara menyeluruh. Salah satu rencana yang tengah digodok adalah menjadikan sebagian area pasar sebagai pasar seni dan pusat kuliner. Untuk mendukung geliat ekonomi masyarakat sekaligus menarik wisatawan.

"Kan masih ada satu sisi yang belum dioptimalkan, jadi mungkin kami isi dengan pasar seni. Kemudian memaksimalkan pasar kulinernya. Kalau sekarang ini masih inisiasi saja sifatnya. Tetapi sudah masuk ke Bappeda, dan alhamdulillah juga direspon dengan baik oleh Pak Bupati," papar Fuad.

Meski begitu, besaran anggaran yang dibutuhkan untuk program revitalisasi ini belum ditentukan. Fuad

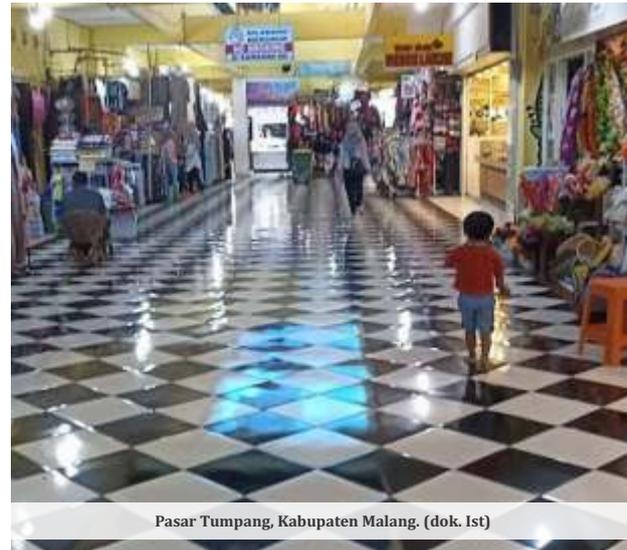
mengaku, pihaknya masih menunggu hasil rancangan desain yang akan mengakomodasi berbagai konsep yang direncanakan.

"(alokasi anggaran) Belum, belum. Kan ini masih coba kami desain, kira-kira bagaimana konsep keseluruhannya. Tetapi dimungkinkan nanti ada pasar seninya," ungkapnya.

Fuad berharap, tahun ini konsep revitalisasi Pasar Tumpang dapat segera difinalisasi dan ditindaklanjuti dalam bentuk kajian, bersama

organisasi perangkat daerah (OPD) terkait serta DPRD Kabupaten Malang.

Lebih lanjut, ditegaskannya, kondisi Pasar Tumpang saat ini masih berjalan normal dan tetap menjadi salah satu andalan Kabupaten Malang. Bahkan, pasar tersebut merupakan satu-satunya pasar di wilayah setempat yang telah memenuhi



Pasar Tumpang, Kabupaten Malang. (dok. Ist)

standar nasional Indonesia (SNI).

"Alhamdulillah perekonomian masih normal. Artinya, Pasar Tumpang ini juga merupakan andalan di Kabupaten Malang. Satu-satunya juga pasar yang sudah SNI di Kabupaten Malang. Makanya kami akan memanfaatkan keunggulan itu, potensi itu untuk mengembangkan," pungkas Fuad. (Santi/Dya)

Desakan 20% APBD untuk Pendidikan Gratis

DISDIKBUD KOTA MALANG: TUNGGU KEBIJAKAN ANGGARAN



Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang, Suwarjana. (Santi/Lentera)

menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 3/PUU-XXII/2024 dengan mengalokasikan 20 persen dari APBD untuk sektor pendidikan.

"Pokoknya kami menunggu anggaran. Karena dengan digratiskan, itu pasti akan ada anggaran yang tersedot untuk pendidikan swasta," ujar Kepala Disdikbud Kota Malang, Suwarjana, Senin (15/9/2025).

Selain belum adanya regulasi turunan dari putusan MK tersebut, Suwarjana juga menjelaskan, tantangan besar akan muncul apabila sekolah swasta yang memiliki biaya pendidikan relatif tinggi, akan ikut serta dalam skema pendidikan gratis.

"Apakah kami mampu untuk membiayai itu? Kami rasa juga mereka kan juga punya pertimbangan sendiri nanti," katanya.

Meski begitu, Suwarjana

memastikan komunikasi dengan sekolah swasta tetap akan dilakukan. Menurutnya, dalam waktu dekat ini, Disdikbud bersama Komisi D DPRD Kota Malang tengah menyiapkan agenda pertemuan dengan sekolah-sekolah swasta. Guna membicarakan tindak lanjut kebijakan-kebijakan terkait pendidikan.

"Kami sudah ada program dengan dewan. Komisi D mengusulkan untuk mengumpulkan sekolah-sekolah swasta," paparnya.

Saat disinggung mengenai kesiapan pemerintah daerah, Suwarjana juga mengaku belum dapat memberikan jawaban pasti. "Dicoba dulu. Saya tidak bisa menjawab bisa atau tidak," tandasnya.

Sementara itu, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) sebelumnya telah mendorong pemerintah untuk segera menyiapkan anggaran khusus. Agar pendidikan dasar gratis dapat diimplementasikan pada 2026 mendatang.

Dalam seminar nasional formulasi pendidikan gratis tingkat sekolah menengah pasca putusan MK di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

(UB) Malang, Senin (15/9/2025), JPPI menegaskan alokasi anggaran pendidikan harus dipenuhi sebesar 20 persen baik dari APBN maupun APBD.

"Putusan ini harus didukung dan wajib disupport oleh APBN sebesar 20 persen, dan juga APBD 20 persen. Karena di level pusat itu kebijakan nasional, tetapi pelaksanaannya adalah pemerintah daerah," ujar Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji.

Ubaid mencontohkan, dalam wilayah Jawa Timur, termasuk Malang Raya, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota wajib mengalokasikan APBD untuk melaksanakan perintah MK terkait sekolah tanpa biaya.

"Pemerintah pusat, Pemkot dan pemkab wajib mengalokasikan dari APBD-nya untuk melaksanakan perintah MK soal sekolah tanpa dipungut biaya," ujarnya.

Ubaid juga menegaskan, hambatan utama kebijakan ini bukan pada kemampuan fiskal, melainkan komitmen politik pemerintah. Menurutnya, APBN dan APBD sudah lebih dari cukup untuk mendukung program tersebut. (Santi/Dya)

SEPEKAN KE DEPAN FILIPINA DISELIMUTI DEMO PROTES KORUPSI

Beberapa kelompok di Filipina dijadwalkan mengadakan demonstrasi menolak korupsi mulai Senin (15/9/2025) hingga Minggu (21/9/2025), berlangsung selama sepekan. Menurut Inquirer, peserta aksi termasuk mahasiswa dari berbagai universitas serta berbagai organisasi sipil lainnya.

University of the Philippines, misalnya, yang dijadwalkan menggelar demo hari Senin (15/9/2025). Seluruh civitas akademika diundang untuk mengikuti demonstrasi hari Senin (15/9/2025).

"Staf UP Cebu, mahasiswa, dan fakultas diundang untuk berpartisipasi dalam ekspresi kolektif kewaspadaan, solidaritas, dan pelayanan kepada masyarakat di halaman UP Cebu di sepanjang Gorordo Avenue pukul 08.00 pagi," kata University of the Philippines.

Sementara kelompok transportasi yang menamakan diri sebagai MANIBELA dijadwalkan akan menggelar demonstrasi pada 17-19 September.

"Tidak dapat diterima bahwa hal-hal ini terjadi sementara kita terperosok dalam kemiskinan dan bencana yang disebabkan oleh pencurian mereka," kata MANIBELA dalam keterangannya.

Kemudian pada 21 September, sejumlah kelompok nasional termasuk kelompok pemuda akan menggelar demonstrasi besar-besaran yang akan digelar di Rizal Park pukul 09.00 pagi waktu setempat. Aksi ini akan dinamakan Bilyon People March atau Bayan.

"Bayan akan memobilisasi pasukannya di Luneta pada pagi hari untuk bergabung dengan berbagai kelompok, menuntut kebenaran, tanggung jawab, dan keadilan terhadap dalang pelaku skandal pengendalian banjir dan korupsi skala besar dalam birokrasi," kata Bagong Alyansang Makabayan dalam pernyataannya.

Awal Mula Kemarahan

Diketahui, kemarahan warga Filipina bermula dari proyek pengendalian banjir yang tak kunjung ada hasilnya. Warga yang marah pun menggerebek kediaman Sarah Discaya, kontraktor yang menangani 5 proyek penanganan banjir di Calumpit dan Baliuag.

Dugaan korupsi pun mencuat

hingga akhirnya Komisi Audit (COA) menyerahkan 5 Laporan Audit Keamanan (FAR) ke Kantor Ombudsman terkait proyek pengendalian banjir yang dilaksanakan oleh Kantor Teknik Distrik 1, Dinas Pekerjaan Umum dan Jalan Raya (DPWH) di Bulacan.

Laporan itu mencakup 5 proyek pengendalian banjir yang dikontrak oleh Wawao Builders, St. Timothy Construction, dan SYMS Construction Trading.

Biaya kontrak untuk proyek tersebut diberikan kepada Wawao Builders yang diyakini berada di balik proyek pengendalian banjir hantu



Para pedemo mengusung orang-orangan Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr dan mantan presiden Rodrigo Duterte dalam pawai peringatan ke-37 tahun revolusi "People Power" yang menggulingkan ayah Presiden Marcos Jr, di Quezon City, Sabtu, 25 Februari 2023. (Foto: AFP)

senilai PHP 151,24 juta (setara Rp 43 miliar), sementara St. Timothy Construction Corporation memenangkan kontrak pemerintah senilai PHP 135,69 juta (setara Rp 38 miliar).

Berdasarkan hasil cek di lapangan, proyek yang dikerjakan perusahaan-perusahaan tersebut sebagian besar cacat dan belum selesai. Ada perusahaan yang menyatakan proyek pengendalian banjir sudah 100 persen selesai, padahal kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa proyek belum selesai. (CBC News, AFP, AP, Reuters, CNN, ist/nei)

TREN INDEKS PERSEPSI KORUPSI FILIPINA

- Filipina skor 33/100 dalam Corruption Perceptions Index (CPI) 2024 oleh Transparency International, naik sedikit dari skor 34 tahun sebelumnya.
- Penilaian ini menempatkan Filipina di peringkat 114 dari 180 negara dalam CPI 2024.
- Meski demikian, skor Filipina tetap jauh di bawah rata-rata global (-43) dan rata-rata Asia Pasifik (-44).

PERKEMBANGAN SKOR DAN RANKING SEBELUMNYA

- Pada tahun-tahun sebelumnya, Filipina pernah mencapai posisi yang lebih tinggi, seperti peringkat ke-99 pada CPI 2018, dengan skor lebih baik dibanding sekarang.
- Namun sejak 2019 ke atas terjadi fluktuasi dan kecenderungan stagnan atau penurunan dalam persepsi publik terhadap korupsi. Ranking turun mendekati atau di bawah posisi ke-110 dalam beberapa tahun. Contoh: 113 (2019), 115 (2020), 117 (2021) berdasarkan laporan CPI.

Janji Marcos: Usut Proyek Banjir Tanpa Pandang Bulu

Presiden Ferdinand Marcos Jr. menegaskan bahwa penyelidikan pemerintah terkait dugaan penyalahgunaan dana publik dalam proyek pengendalian banjir tidak akan memberi keistimewaan bagi siapa pun, termasuk keluarga maupun sekutunya. Ia juga menyuarakan dukungan terhadap gelombang aksi protes antikorupsi yang sedang berlangsung.

"Wajar jika mereka marah dan kecewa, saya pun merasakan hal yang sama. Kita semua patut marah karena apa yang terjadi jelas tidak benar," ujar Marcos dalam konferensi pers yang ditayangkan televisi pada Senin (15/9/2025). "Andai saya bukan presiden, mungkin saya juga akan bergabung turun ke jalan bersama mereka."

Kampanye antikorupsi yang digagas Marcos telah mendorong investigasi di parlemen dan menyingkap skandal besar terkait proyek pengendalian banjir. Sejumlah proyek ditemukan bermasalah, berkualitas rendah,

bahkan ada yang sama sekali tidak terealisasi. Fakta ini menyulut amarah publik di negara Asia Tenggara yang setiap tahunnya menghadapi sekitar 20 badai tropis.

Meski begitu, Marcos menekankan bahwa protes harus tetap berlangsung secara damai. Ia memperingatkan aparat keamanan akan mengambil tindakan tegas jika aksi berubah menjadi kekerasan. Menanggapi kekhawatiran bahwa pemaparan dapat berkembang seperti yang terjadi di negara-negara lain di kawasan, ia mengatakan hal itu hanya mungkin terjadi "jika kita tidak melakukan apa-apa."

Beberapa negara tetangga Filipina memang tengah dilanda gejolak akibat korupsi dan krisis ekonomi. Di Nepal, protes besar yang terjadi pada puluhan orang pekan lalu berakhir pada pengangkatan perdana menteri sementara. Sementara itu, Indonesia juga tengah meredakan keresahan masyarakat yang memicu protes terburuk dalam

beberapa tahun terakhir.

Sebagai tanggapan, Marcos membentuk komisi independen untuk menyelidiki berapa banyak dana proyek pengendalian banjir yang digelapkan dalam satu dekade terakhir. Ia menegaskan bahwa siapa pun yang terbukti bersalah akan dijera hukum dan dipenjara, sementara kontraktor nakal tetap diwajibkan menyelesaikan proyek sesuai ketentuan garansi dalam kontrak.

"Kami berusaha bergerak secepat mungkin," ujar Marcos. Komisi independen tersebut mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan sidang, mengeluarkan panggilan paksa, memberikan izin penangguhan pejabat publik, serta membekukan aset. Komisi yang dijadwalkan mulai bekerja pada hari Senin. (CBC News, AFP, AP, Reuters, CNN, ist/nei)

Overthinker? Bisa Jadi Kamu Orang Cerdas

Apakah kamu pernah merasa pikiran terus berputar pada satu hal tanpa henti hingga membuatmu merasa lelah sendiri? Jika iya, mungkin kamu termasuk tipe overthinker, yaitu orang yang gemar memikirkan berbagai kemungkinan, bahkan yang paling sepele sekalipun. Namun, penting untuk diketahui bahwa overthinking tidak selalu identik dengan rasa cemas yang berlebihan.

Dikutip dari Resto NYC, ada perbedaan jelas antara overthinking yang dipicu oleh kecemasan biasa dan overthinking yang lahir dari kecerdasan. Orang dengan kapasitas berpikir tinggi cenderung melihat lebih banyak sudut pandang, mempertimbangkan detail kecil, serta memiliki kesadaran yang tajam terhadap potensi risiko. Kemampuan ini membuat mereka mampu menganalisis situasi dengan lebih mendalam dibandingkan kebanyakan orang.

Namun, kelebihan tersebut juga bisa berubah menjadi beban jika tidak dikelola dengan baik. Terlalu banyak mempertimbangkan kemungkinan dapat memunculkan keraguan, rasa ragu-ragu, hingga kesulitan dalam mengambil keputusan. Oleh karena itu, penting bagi overthinker cerdas untuk menjaga keseimbangan antara analisis mendalam dan keberanian bertindak.

Walau kerap dipandang sebagai sesuatu yang negatif, sebenarnya overthinking juga bisa menjadi indikasi bahwa kamu memiliki kecerdasan, asalkan tidak tenggelam dalam lingkaran pikiran yang tak ada ujungnya.

Melihat Masalah dari Berbagai Sudut Pandang

Orang dengan kecerdasan tinggi umumnya memiliki kecenderungan untuk berpikir kritis dan tidak mudah mengambil keputusan secara impulsif. Mereka terbiasa mempertimbangkan berbagai kemungkinan, memperhitungkan dampak jangka panjang, serta menilai situasi dari beragam sudut pandang. Dilansir dari Resto NYC, hal ini mencerminkan kemampuan menganalisis kompleksitas yang tidak dimiliki oleh semua orang.

Namun, kebiasaan tersebut juga memiliki sisi lain yang perlu diwaspadai. Jika tidak dikelola dengan baik, kecenderungan menganalisis terlalu dalam bisa membuat seseorang terjebak dalam proses berpikir yang berlarut-larut. Bukannya menghasilkan keputusan yang matang, justru muncul keraguan yang memperlambat tindakan.

Di sinilah pentingnya keseimbangan antara berpikir kritis dan kemampuan mengambil keputusan dengan tegas. Orang cerdas perlu belajar menentukan batas kapan harus terus menganalisis dan kapan harus berhenti untuk segera bertindak. Dengan begitu, potensi overthinking bisa dikendalikan sehingga kecerdasan benar-benar menjadi kekuatan, bukan hambatan.

Peka terhadap Detail Kecil

Overthinker cerdas biasanya memiliki kepekaan tinggi terhadap hal-hal kecil yang sering luput dari perhatian. Mereka mampu memperhatikan pola, gestur, atau bahkan kemungkinan risiko yang tersembunyi. Kemampuan ini berkaitan dengan kapasitas working memory yang

tinggi, sehingga memungkinkan mereka memproses banyak informasi secara bersamaan.

Namun, terlalu fokus pada detail juga dapat menjadi bumerang. Jika tidak diimbangi dengan pandangan menyeluruh, seseorang bisa kehilangan gambaran besar dan terjebak dalam hal-hal kecil yang kurang penting. Hal ini dapat menghambat pengambilan keputusan dan membuat langkah yang seharusnya sederhana justru terasa rumit.

Melihat Pola di Tempat Tidak Jelas

Salah satu tanda overthinker dengan IQ tinggi adalah kecenderungan untuk melihat pola bahkan ketika sebenarnya tidak ada. Fenomena ini dikenal sebagai false pattern recognition, yaitu bias kognitif yang muncul karena otak bekerja terlalu aktif dalam menghubungkan berbagai informasi. Akibatnya, seseorang bisa menarik kesimpulan yang tidak selalu akurat atau bahkan keliru.

Meski demikian, kecenderungan ini juga dapat menjadi modal yang kuat dalam berpikir kreatif. Dengan kemampuan mengaitkan hal-hal yang tampak tidak berhubungan, seseorang bisa menemukan ide baru, sudut pandang unik, dan solusi inovatif yang mungkin tidak terpikirkan oleh orang lain.

Membedakan Analisis dan Kecemasan Emosional

Overthinker cerdas biasanya memiliki kesadaran metakognitif yang baik, yaitu kemampuan untuk menyadari proses berpikirnya sendiri. Artinya, kamu bisa membedakan kapan pikiran sedang berjalan secara logis dan kapan mulai terdorong oleh emosi. Kemampuan ini memberi ruang untuk memahami diri sendiri secara lebih mendalam.

Kesadaran tersebut juga berfungsi sebagai pengendali agar tidak tenggelam dalam kekhawatiran yang berlebihan. Dengan menyadari arah pikiran, kamu bisa mengatur ulang fokus, menilai prioritas, dan kembali pada hal-hal yang lebih produktif. Ini menjadi salah satu kelebihan utama yang membuat overthinker cerdas tetap bisa menjaga keseimbangan dalam hidupnya.

Terbuka terhadap Fakta Baru

Ciri khas overthinker yang cerdas adalah fleksibilitas dalam berpikir. Kamu mampu menyesuaikan sudut pandang seiring munculnya data, informasi, atau masukan baru. Hal ini membuat proses berpikir menjadi lebih dinamis dan tidak kaku, sehingga keputusan yang diambil bisa lebih relevan dengan situasi yang sedang dihadapi.

Selain itu, orang cerdas biasanya lebih terbuka terhadap ketidakpastian dan tidak terlalu terikat pada keyakinan awal.

Mereka tidak segan untuk mengakui kesalahan serta memperbaiki keputusan tanpa dibawa ego. Sikap ini bukan hanya mencerminkan kedewasaan intelektual, tetapi juga menjadi kunci penting dalam pengembangan diri dan kemampuan beradaptasi.

Seorang Overthinker

Overthinking memang sering menjadi tantangan, terutama jika tidak dikendalikan dengan baik. Pikiran yang terus berputar bisa membuatmu merasa lelah, ragu, dan sulit mengambil langkah.

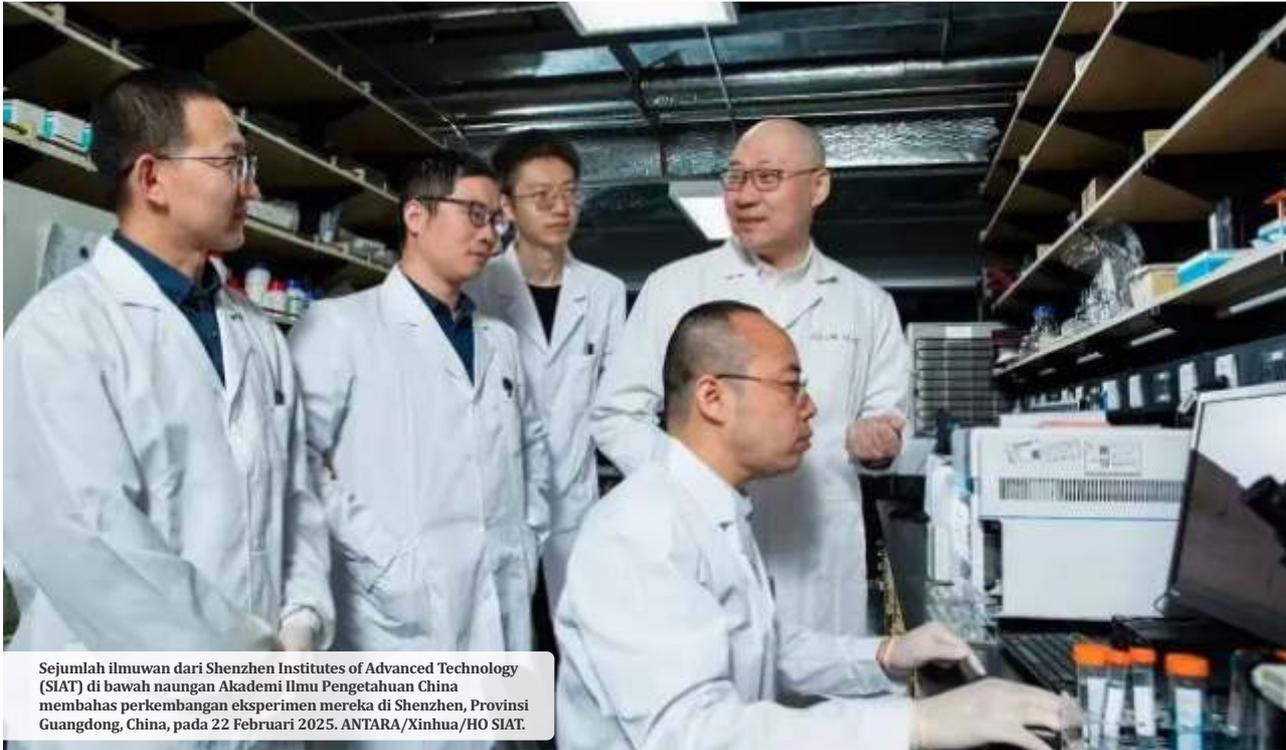
Namun, bukan berarti kecenderungan ini harus ditekan atau dihilangkan sepenuhnya, karena sebenarnya ada sisi positif yang bisa dimanfaatkan. Dengan mengenali pola overthinking, kamu bisa mengarahkan energi berpikir itu menjadi kekuatan.

Analisis yang mendalam bisa membantumu melihat detail yang terlewat oleh orang lain, serta mempertimbangkan risiko dengan lebih matang. Kuncinya ada pada keseimbangan antara berpikir kritis dan kemampuan untuk mengambil keputusan secara tegas tanpa terlalu lama terjebak dalam keraguan.

Melalui bimbingan yang tepat, seperti terapi kognitif, latihan mindfulness, atau strategi manajemen diri lainnya, kamu bisa belajar mengelola overthinking dengan lebih bijak. Cara ini tidak hanya membantu mengurangi beban mental, tetapi juga menjadikanmu lebih adaptif dan produktif dalam menghadapi berbagai situasi hidup. Dengan melatih pikiran agar lebih fokus pada hal-hal yang bisa dikendalikan, kamu juga akan lebih mudah menemukan ketenangan batin. (nei,ist/dya)



CHINA KEMBANGKAN NANOZYME CANGGIH UNTUK LAWAN KANKER



Sejumlah ilmuwan dari Shenzhen Institutes of Advanced Technology (SIAT) di bawah naungan Akademi Ilmu Pengetahuan China membahas perkembangan eksperimen mereka di Shenzhen, Provinsi Guangdong, China, pada 22 Februari 2025. ANTARA/Xinhua/HO SIAT.

Dalam dunia kedokteran modern, imunoterapi menjadi salah satu harapan besar dalam melawan kanker. Terapi ini bekerja dengan cara memanfaatkan sistem kekebalan tubuh pasien untuk mengenali serta menghancurkan sel-sel kanker. Namun, efektivitas imunoterapi sering kali terhambat oleh kemampuan luar biasa sel kanker dalam menyamarkan diri.

Sel kanker biasanya hanya menampilkan sedikit sinyal alami di permukaannya, sehingga sulit dideteksi oleh sistem imun. Inilah yang

membuat para peneliti terus mencari teknologi baru agar sel imun dapat lebih efektif menyerang tumor.

Untuk mengidentifikasi sel kanker dengan akurat, tim peneliti yang dipimpin oleh Han Shuo dari Pusat Keunggulan Ilmu Sel Molekuler di bawah naungan Akademi Ilmu Pengetahuan China (Chinese Academy of Sciences/CAS) telah menerapkan teknologi pelabelan proksimitas dari penelitian biologi kimia untuk pengobatan penyakit.

Menjawab tantangan tersebut, tim peneliti yang dipimpin oleh Han Shuo

dari Pusat Keunggulan Ilmu Sel Molekuler, Akademi Ilmu Pengetahuan China (CAS) berhasil menemukan terobosan. Mereka mengadopsi teknologi pelabelan proksimitas yang sebelumnya digunakan dalam penelitian biologi kimia, lalu menerapkannya ke bidang pengobatan kanker.

Hasilnya adalah pengembangan nanozyme rekayasa, sebuah partikel cerdas berukuran nano yang dijuluki sebagai "robot penanda nano." Alat ini mampu merespons cahaya merah tua atau

gelombang ultrasonografi untuk secara akurat menandai sel kanker.

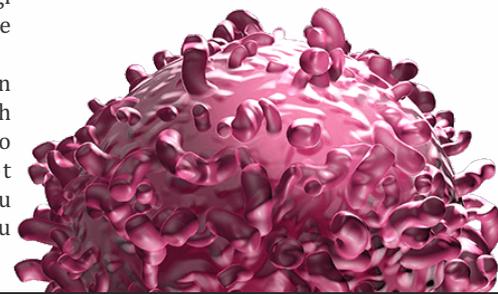
Nanozyme mampu membawa antibodi atau ligan khusus yang berfungsi mengenali sel kanker secara selektif, lalu beredar melalui sirkulasi darah hingga menemukan targetnya. Setelah menempel, partikel ini berkembang pada permukaan sel kanker, sehingga memudahkan proses identifikasi dan memungkinkan sistem imun menyerang dengan lebih tepat tanpa merusak sel sehat di sekitarnya.

Dengan bantuan instruksi berupa cahaya merah tua atau gelombang ultrasonografi, nanozyme mampu menandai sel kanker secara jelas, sehingga sel-sel berbahaya tersebut berubah menjadi target yang mudah dikenali dan diserang oleh sistem imun maupun terapi medis dengan tingkat presisi yang lebih tinggi.

Dalam eksperimen yang dilakukan, para peneliti menyuntikkan molekul BiTE khusus ke dalam tubuh tikus, yang tidak hanya berfungsi untuk mengenali dan mengikat target sel kanker, tetapi juga mampu mengaktifkan sel T sistem imun sehingga lebih agresif dalam menyerang serta menghancurkan sel-sel kanker yang terdeteksi.

"Sistem penanda ini juga dapat mengaktifkan sistem kekebalan tubuh secara keseluruhan untuk membentuk memori jangka panjang, seolah-olah 'vaksin tumor' telah disuntikkan ke dalam tubuh," kata Han.

Studi ini telah menunjukkan efek terapeutik yang baik pada model tumor tikus eksperimental dan sampel tumor klinis in vitro. Menurut Han, studi ini diharapkan dapat membuka jalan baru untuk pengembangan imunoterapi generasi berikutnya yang lebih pintar dan efisien. (nei,ist/dya)



HARIAN
LENTERA
Inspirasi Perubahan **TODAY**

HARIAN "LENTERA TODAY"
PIMPINAN PERUSAHAAN TARMUJI TALMACSI
OMBUDSMAN SUKARJITO (ID Sertifikasi 14319)
PENANGGUNG JAWAB ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
PIMPINAN REDAKSI ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
REDAKTUR PELAKSANA AGUSTINA WIDYAWATI (ID Sertifikasi 2567)
REDAKTUR LUTFIYU HANDI, NEISKA OLIVIANA (CO)

KORAN DIGITAL LENTERA TODAY
Terbit Senin - Jumat (12 Halaman)
download edisi digital pada web
www.lenteratoday.com
VERIFIKASI FAKTUAL DEWAN PERS
803/DP-Verifikasi/K/X/2021



MEDIA TERVERIFIKASI

BIRO: SURABAYA: YOLANDA APRILLIA PRADITHA, AMANAH NUR ASIAH, JOKO PRASETYO | **GRESIK:** ASEPTA YOGA P. (SERTIFIKASI WARTAWAN UTAMA) | **MOJOKERTO:** NUR HIDAYAH | **LAMONGAN:** L HANDI | **BLITAR:** ARIEF SUKAPUTRA | **KEDIRI:** GATOT SUNARKO | **JOMBANG :** SUTONO | **PASURUAN-PROBOLINGGO-PONOROGO :** IMAN SANTOSO | **BONDOWOSO- SITUBONDO-LUMAJANG-JEMBER-BANYUWANGI:** PURCAHYONO JULIATMOKO | **MADIUN:** WIWIET EKO PRASETYO (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA) | **MALANG RAYA:** SANTI WAHYU SANIA (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA), ISKANDAR Z. | **MADURA RAYA:** SAHLAN KURNIAWAN | **TRENGGALEK:** TINA W | **NGAWI:** DIMAS RIDHO SURYO BASKORO | **DKI JAKARTA:** FUAD HASSAN | **LOMBOK BARAT:** MUHAYYAN | **PALANGKA RAYA:** NOVITA MASNIARI

PENASEHAT HUKUM DR. NURIYANTO A. DAIM, SH, MH | **MARKETING COMMUNICATION** JOKO PRASETYO UTOMO, ISKANDAR ZULKARNAIN | **SEKERTARIS** FITRIYANTI SUTAN, FARADITA NUR FADHILAH
DESAIN GRAFIS PAULUS IVAN | **ALAMAT REDAKSI** JL RUNGKUT ASRI UTARA VI/26 | **TELP** 03187854491 | **PENERBIT** PT MEDIA HEBAT INSPIRASI INDONESIA | **ALAMAT PERCETAKAN** SMILE GRAFIKA JL. RAYA KALIRUNGKUT 42 SURABAYA | **TELP IKLAN** 031-87854491 | **NIB** 91205006801134 | **HARGA IKLAN** RP 25.000 MM/KOLOM

Wartawan Lentera Today dalam setiap bertugas dilengkapi dengan tanda pengenal wartawan/kartu pers yang dikeluarkan perusahaan secara sah. Nama pemegang tanda pengenal wartawan/kartu pers Lentera Today tercantum di Box Redaksi. Siapa pun yang mengaku/mengatasnamakan Lentera Today, tanpa bisa menunjukkan surat/kartu tanda pengenal atau namanya tidak tercantum dalam Kotak Redaksi, agar ditolak/ dikonfirmasi/dilaporkan ke manajemen redaksi/perusahaan atau melalui nomor telepon yang tertera di Kotak Redaksi. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, setiap wartawan Lentera Today dilarang menerima dan/atau meminta apa pun dengan alasan apa pun.

Mix & Match Korset ala Fashionista Modern

Korset menjadi salah satu busana yang bertransformasi dalam hal pemakaiannya. Semula termasuk ke dalam jenis pakaian dalam dan dibuat untuk membentuk tubuh, kini korset telah berubah fungsi sebagai atasan.

Korset menjadi salah satu busana yang bertransformasi dalam hal pemakaiannya. Semula termasuk ke dalam jenis pakaian dalam dan dibuat untuk membentuk tubuh, kini korset telah berubah fungsi sebagai atasan.

Salah satu faktor yang melanda hal tersebut tampaknya dipengaruhi oleh perubahan cara pandang perempuan terhadap korset. Benda mode yang sudah eksis sejak abad ke-16 ini memang penuh kontroversi. Korset dianggap sebagai simbol yang mengekang kebebasan perempuan sekaligus membentuk standar kecantikan yang tidak realistis.

Kini, korset lebih diasosiasikan sebagai busana bergaya seksi dan glamor. Tengok Taylor Swift dan Sabrina Carpenter yang kerap mengenakan korset sebagai kostum

panggung mereka. Tentunya korset juga bisa dipakai sebagai busana sehari-hari. Berikut tips mix & match korset agar tampilanmu makin standout.

Orang Paris yang Tajam

Suka tampil anggun dengan sentuhan edgy? Cobalah memadukan korset hitam dengan bawahan bermotif bold, baik itu celana maupun rok. Paduan ini akan memberi kesan tegas sekaligus feminin, cocok untuk kamu yang ingin tampil berbeda tanpa kehilangan sisi elegan.

Tidak hanya itu, permainan warna juga menjadi kunci penting dalam menciptakan tampilan yang menarik. Kontras antara hitam dan merah, misalnya, bisa memberikan efek dramatis yang kuat sekaligus stylish. Warna merah yang energik mampu menyeimbangkan kesan misterius dari hitam, menghasilkan kombinasi klasik yang selalu relevan di dunia fashion.

Jangan ragu menambahkan lapisan luaran seperti blazer berpotongan oversized untuk menciptakan siluet yang lebih modern. Blazer ini tidak hanya menambah dimensi pada penampilanmu, tetapi juga membuat outfit terasa lebih versatile, sehingga bisa dikenakan untuk acara kasual hingga semi-formal dengan tetap menjaga karakter edgy yang anggun.

Denim

Korset tidak selalu identik dengan tampilan formal atau glamor, karena dengan padu

padan yang tepat, item ini bisa terlihat lebih santai dan tetap fashionable. Cobalah memilih korset bermotif, misalnya leopard print, lalu kombinasikan dengan rok denim midi atau jeans andalanmu. Perpaduan ini menciptakan kesan kasual yang tetap chic, sehingga cocok dikenakan untuk hangout atau jalan santai.

Untuk mempertegas gaya easy chic, tambahkan chunky boots yang memberi sentuhan tegas pada keseluruhan outfit. Agar tampilan tetap seimbang, pilih aksesoris sederhana seperti kacamata hitam bergaya klasik atau kalung minimalis. Detail kecil ini mampu menambahkan karakter tanpa membuat look terlihat berlebihan.

Kunci utama dari gaya ini adalah menjaga keseimbangan. Biarkan korset dengan motif bold tampil menonjol sebagai pusat perhatian, sementara denim dan chunky boots memberikan nuansa santai yang stylish. Dengan komposisi ini, kamu bisa tampil effortlessly modis tanpa kehilangan kenyamanan.

Sporty Bertemu Seksi

Korset ternyata juga bisa dijadikan alternatif pengganti T-shirt saat kamu ingin tampil sporty namun tetap stylish. Tidak seperti gaya kasual biasanya, untuk tampilan ini lebih disarankan memilih nuansa serba hitam agar terlihat edgy dan tidak berlebihan. Warna hitam memberi kesan sleek sekaligus modern, sehingga membuat korset tampak lebih versatile untuk dipadukan dengan item sporty lainnya.

Untuk melengkapi gaya ini, kamu bisa memadukan korset hitam dengan celana track pants atau jogger, lalu

tambahkan jaket bomber atau hoodie sebagai lapisan luar. Pilihan ini akan memberikan vibe sporty yang kuat, namun tetap terjaga sisi feminin berkat siluet korset. Aksesoris berwarna netral atau metalik juga bisa dipertimbangkan agar tidak mengganggu harmoni tampilan serba hitam.

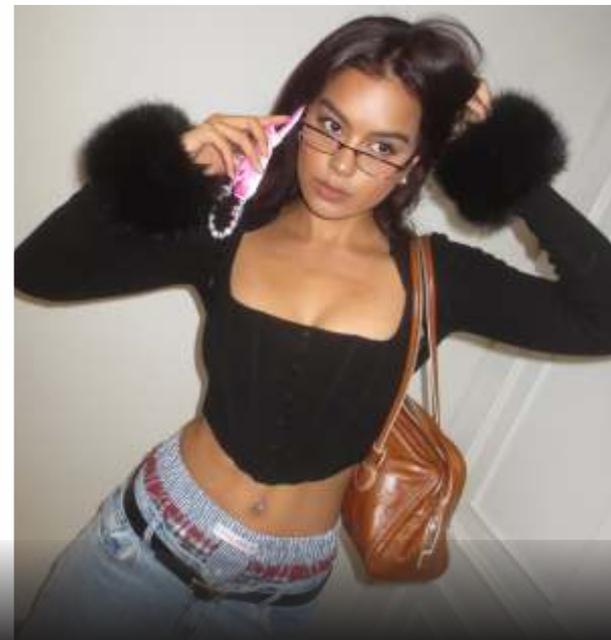
Agar tidak terlihat monoton, padukan elemen sporty dengan item feminin seperti pointy pump atau tas klasik berukuran kecil. Kontras ini akan menciptakan keseimbangan unik—memberi kesan tangguh sekaligus anggun sehingga outfit tetap modis dan berkarakter tanpa terkesan berlebihan.

Keren Tanpa Usaha

Untuk memberikan kesan kasual namun tetap stylish, korset bisa dipadukan dengan bawahan bernuansa santai seperti kulot denim, jeans wide-leg, atau celana kargo, lalu dilengkapi dengan sneakers atau chunky boots agar tetap nyaman sekaligus modern.

Paduan ini menciptakan tampilan laid-back tanpa menghilangkan sisi feminin korset, sementara aksesoris simpel seperti kacamata hitam dan tas crossbody akan menambahkan sentuhan keren serta membuat gaya terlihat effortless untuk berbagai aktivitas sehari-hari.

Kunci dari gaya ini adalah memainkan proporsi. Siluet korset yang fit di tubuh akan menyeimbangkan potongan kulot atau jeans yang longgar, sehingga tercipta tampilan edgy namun tetap stylish. Dengan trik ini, kamu bisa memaksimalkan kesan kasual tanpa kehilangan sisi chic dari korset. (nei,ist/dya)



Gibran Digugat ...dari hal 1

Karena yang ini perbuatan melawan hukum, korbannya sistem negara hukum. Maka sistem negara hukum ini adalah negara yang milik seluruh warga negara Indonesia. Maka uang (ganti rugi) itu akan saya minta disetor ke kas negara untuk warga negara lagi, kembali ke warga negara," kata Subhan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (15/9/2025).

Subhan menyebutkan, karena itu pula ia mengajukan ganti rugi sebesar Rp 125 triliun dalam gugatan yang ia layangkan terhadap Gibran dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tersebut.

"Jumlah warga negara kita sekarang berapa? 285 juta, (Rp 125 triliun) bagi itu, (per orang kira-kira dapat) Rp 450.000, enggak ada 1 ember kan. (Hitungan uang ganti rugi) dari sana. Bukan asal-asal ada," ujar Subhan dilansir Kompas.

Subhan menggugat Gibran dan KPU karena menilai mereka telah melakukan perbuatan melawan hukum karena ada beberapa syarat pendaftaran calon wakil presiden (Cawapres) yang dahulu tidak terpenuhi.

Untuk itu, Subhan selaku penggugat meminta agar majelis hakim yang mengadili perkara ini menyatakan Gibran dan KPU telah melakukan perbuatan melawan hukum. Subhan juga meminta agar majelis hakim menyatakan status Gibran saat ini sebagai Wapres tidak sah.

Gibran dan KPU juga dituntut untuk membayar uang ganti rugi senilai Rp 125 triliun kepada negara. "Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar kerugian materiil dan immateriil kepada Penggugat dan seluruh Warga Negara Indonesia sebesar Rp 125 triliun dan Rp 10 juta dan disetorkan ke kas negara," bunyi petitum gugatan.

Pada persidangan Senin (15/9/2025) dengan agenda pemeriksaan legal standing, penggugat dan para tergugat hadir. Gibran diwakili kuasa hukum dari tim jaksa pengacara negara (JPN). Dalam sidang itu penggugat menyatakan keberatan karena menyebut gugatan itu ditujukan terhadap Gibran secara pribadi, bukan jabatan Wapres.

"Namun demikian, tergugat I tidak hadir karena saya keberatan, karena diwakili oleh jaksa pengacara negara. Makanya saya keberatan karena saya menggugat adalah pribadi, secara personal. Kejaksaan itu mewakili negara saya, tidak bisa membela dia. Makanya saya keberatan. Jaksa pengacara negara saya minta keluar dari persidangan. Itu yang paling penting. Jadi gugatan ini akan ditunda, akan disidang lagi Minggu depan," ujar Subhan dilansir Kompas.

Sebelum sidang Subhan juga merespons tanggapan mantan Presiden Joko Widodo ihwal adanya beking atau back up dalam gugatan yang dia lakukan. "Harusnya ditunjuk aja siapa orang besar ini, Supaya enggak jadi fitnah," katanya.

"Jadi tuduhan ada orang besar itu, seharusnya ditunjuk. Karena kalau mengacu ke situ, nanti kan sama aja kita ngomong enggak ada buktinya. Untuk apa?" kata pria yang berprofesi sebagai advokat itu.

Sebelumnya, Joko Widodo menanggapi tentang gugatan soal ijazah SMA terhadap putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka. Dia mengatakan, gugatan yang memperlakukan ijazah sudah bergulir sejak dulu.

"Kan tidak hanya sehari-dua hari. Ini sudah dari empat tahun yang lalu, sudah ada itu. Kalau yang nafasnya panjang itu enggak ada yang mem-back up kan tidak mungkin? Kan gampang-gampang aja," kata Jokowi Jumat (12/9/2025).

Meski begitu, Jokowi mengatakan putranya akan mengikuti proses hukum. Dia berkelakar, keluarganya akan melayani semua gugatan.

Terkait sekolah Gibran di Singapura yang dipersoalkan, Jokowi mengatakan dirinya sendiri yang mencari. "Iya di Orchard Park Secondary School Singapura, yang mencari saya. Itu saya ngerti lah," ujarnya.

Jokowi mengatakan ia sengaja mengirim Gibran bersekolah ke luar negeri agar anaknya itu bisa hidup mandiri. "Biar mandiri aja," ujarnya.

Sementara itu, Jokowi sendiri kembali harus menghadapi gugatan terkait ijazah. Terbaru, Jokowi digugat oleh dua alumni Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta bernama Top Taufan Hakim dan Bangun Sutoto. Keduanya melayangkan gugatan Citizen Lawsuit (CLS) terhadap Jokowi sebagai pihak tergugat 1.

Selain Jokowi, ada Rektor UGM Ova Emilia sebagai tergugat 2; Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Pengajaran Wening Udasmoro sebagai tergugat 3; Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sebagai tergugat 4, dan UGM sebagai turut tergugat. Pengadilan Negeri (PN) Kota Solo menjadwalkan sidang perdana gugatan tersebut dijadwalkan pada Selasa, 16 September 2025, pukul 10.00 WIB. Muhammad Taufiq, kuasa hukum Top Taufan Hakim, menjelaskan gugatan CLS tersebut telah didaftarkan di PN Kota Solo dengan nomor registrasi PN-SKT 28082025GIR pada 28 Agustus 2025 lalu.

Sementara itu, kuasa hukum Gibran, Dadang Herli Saputra mengaku belum ada arahan khusus dari Gibran terkait dengan sidang tersebut. "Saya kira biasa saja," tuturnya usai sidang di Pengadilan

Negeri Jakarta Pusat, Senin (15/9/2025).

Dadang belum tahu apakah kliennya akan hadir dalam tahap mediasi pada persidangan berikutnya yang dijadwalkan tanggal 22 September 2025. Dia menuturkan, masih ada tahapan-tahapan lain dalam persidangan. "Nanti kita lihat," ujar Dadang singkat.

Dadang juga tak menjawab secara gamblang saat ditanya pendapat Gibran mengenai gugatan ini. Dia meminta awak media bertanya langsung kepada Wakil Presiden itu. "Kami hanya diberikan kuasa untuk bersidang," kata Dadang dilansir tempo.

Dia menuturkan, pengacara yang mewakili Gibran dalam perkara ini berasal dari AKA Law Firm yang berkedudukan di Jakarta. Tiga advokat dari kantor pengacara tersebut untuk mewakili Gibran.

Dadang menuturkan, surat kuasa itu diberikan Gibran pada Selasa, 9 September 2025. Ini setelah penggugat keberatan Gibran menggunakan jaksa pengacara negara dari Kejaksaan Agung pada sidang perdana, 8 September 2025.

Namun, Majelis hakim menunda sidang untuk melengkapi berkas Gibran selaku tergugat 1 dan Komisi Pemilihan Umum selaku tergugat 2. "Nanti sidang berikutnya Senin tanggal 22 untuk melengkapi legal standing dari T1, T2," ujar Ketua Majelis Hakim, Budi Prayitno, dalam persidangan.

Tekait dengan gugatan ini, Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg), Juri Ardiantoro pun angkat bicara. Dia mengatakan Istana atau lembaga eksekutif tak bisa mengintervensi kebijakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang memutuskan untuk merahasiakan dokumen persyaratan calon presiden (capres), termasuk ijazah.

Dia menjelaskan KPU merupakan lembaga independen yang bekerja tanpa pengaruh dari lembaga lain. "Dia nggak bisa dipengaruhi oleh lembaga lain, oleh eksekutif. Dia lembaga independen, kami menghormati," kata Juri di kompleks parlemen, Jakarta, dilansir antara Senin (15/9/2025).

Menurut dia, KPU pun sudah menjelaskan terkait kebijakan itu yang bisa menjadi pedoman bagi publik. Dia menilai pertanyaan-pertanyaan publik terkait keputusan itu pun perlu ditanyakan langsung ke pihak KPU.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan sebanyak 16 dokumen syarat pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden sebagai informasi yang dikecualikan atau tidak bisa dibuka untuk publik tanpa persetujuan dari pihak terkait.

Hal tersebut tertuang dalam Keputusan KPU RI Nomor 731 Tahun 2025 tentang Penetapan Dokumen Persyaratan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Sebagai Informasi Publik yang Dikecualikan KPU.

"Keputusan KPU 731/2025

tersebut telah menetapkan beberapa informasi dokumen persyaratan calon Presiden dan Wakil Presiden (Diktum kedua) telah dikecualikan dalam jangka waktu 5 tahun, kecuali pihak yang rahasianya diungkapkan memberikan persetujuan tertulis dan/atau pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik (Diktum ketiga)," kata Ketua KPU Afifuddin.

Terpisah, Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda juga turut menyoroti terbitnya Keputusan KPU Nomor 731 Tahun 2025 yang menetapkan 16 dokumen persyaratan calon presiden dan calon wakil presiden, termasuk ijazah, sebagai informasi yang dikecualikan dari akses publik.

Keputusan yang ditandatangani oleh Kepala Biro Hukum KPU dan Ketua KPU Afifudin pada 21 Agustus 2025 tersebut berlaku selama lima tahun, namun tetap dapat dibuka apabila pemilik dokumen memberikan persetujuan.

Rifqinizamy menilai keputusan tersebut menimbulkan banyak pertanyaan, terutama terkait waktu penerbitannya yang keluar setelah seluruh tahapan Pemilu 2024 selesai. "Kalau mau bicara terkait dengan keputusan KPU tertentu, idealnya seluruh aturan kepemiluan diatur berdasarkan undang-undang atau setidaknya Peraturan KPU. Dan waktunya semestinya dibuat sebelum tahapan pemilu berlangsung, bukan setelahnya," ujarnya dalam dikutip Parlemenaria, di Jakarta, Senin (15/9/2025).

Ia menegaskan bahwa dokumen persyaratan untuk menjadi peserta pemilu, baik legislatif, presiden, maupun kepala daerah, pada prinsipnya harus terbuka bagi publik. Hal itu sejalan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. "Dokumen persyaratan pencalonan bukan merupakan rahasia negara dan tidak mengganggu privasi seseorang. Justru, sebagai bagian dari transparansi dan akuntabilitas pemilu, dokumen itu seharusnya bisa diakses publik," katanya.

Lebih lanjut, Politisi Fraksi Partai NasDem ini mengingatkan bahwa selama ini sejumlah situs kepemiluan justru telah membuka akses luas terhadap dokumen calon anggota legislatif, termasuk visi-misi, surat keterangan catatan kepolisian, hingga ijazah. Karena itu, ia meminta KPU memberikan klarifikasi terbuka agar keputusan tersebut tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat.

"Publik saat ini sangat membutuhkan transparansi dan akuntabilitas dari semua lembaga negara, terlebih lembaga demokrasi yang mengurus pemilu. Jangan sampai keputusan seperti ini menimbulkan simpang siur dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemilu," tegasnya. (han,rls,ist,ant/lut)

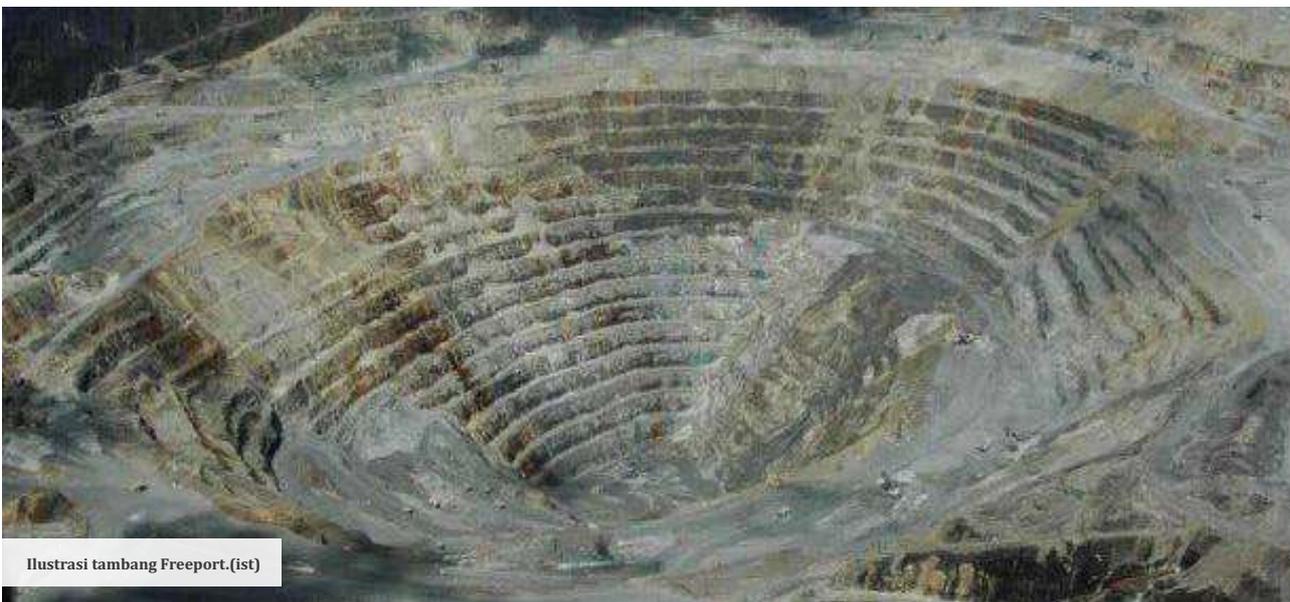
RI SEGERA AKUISISI LEBIH DARI 10% SAHAM FREEPORT

Pemerintah RI akan segera menambah kepemilikan saham di PT Freeport Indonesia (PTFI) lebih dari 10%. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan rencana tersebut akan segera terealisasi dalam waktu dekat.



Saya dipanggil (Presiden Prabowo Subianto) untuk ditanyakan tentang kesepakatan dan tadinya awalnya kita sepakat penambahan saham 10% Freeport. Akan tetapi, tadi berkembang negosiasi yang insyallah katanya lebih dari itu,"

Bahlil Lahadalia
Menteri ESDM



Ilustrasi tambang Freeport.(ist)

“Saya dipanggil (Presiden Prabowo Subianto) untuk ditanyakan tentang kesepakatan dan tadinya awalnya kita sepakat penambahan saham 10% Freeport. Akan tetapi, tadi berkembang negosiasi yang insyallah katanya lebih dari itu,” kata Bahlil setelah melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Senin (15/9/2025).

Bahlil mengaku telah melaporkan rencana penambahan saham tersebut ke Prabowo dan diarahkan untuk melakukan percepatan proses penambahan saham. Setelah itu, lanjut Bahlil, ketika proses negosiasi penambahan saham telah rampung, maka izin usaha pertambangan khusus (IUPK) PTFI selepas 2041 akan diperpanjang.

“Awalnya penambahan saham Freeport 10%, perkembangan yang terjadi di atas 10%, berapa pastinya nanti akan saya umumkan setelah tanda tangan proses perpanjangan,” tegas dia dilansir Bloomberg.

Terkait dengan akuisisi 10% lebih dari dari saham PTFI ini, Bahlil mengaku pemerintah akan mengeluarkan biaya yang sangat murah. Terlebih, pemerintah memandang valuasi aset milik PTFI yang dijadikan dasar perhitungan memiliki nilai yang cukup kecil.

“Biayanya sangat murah sekali karena valuasi aset nya kan kita anggap itu sudah nilai bukannya sangat

tipis sekali. Namun, itu akan terjadi untuk sampai 2041, dan sekarang perhitungan sudah dijalankan,” pungkas Bahlil.

Saat ini, pemerintah melalui holding BUMN pertambangan, PT Mineral Industri Indonesia (MIND ID), baru memegang sekitar 51,2% kepemilikan saham di Freeport Indonesia. Dengan begitu, tambahan saham lebih dari 10% tersebut akan menambah porsi kepemilikan menjadi lebih dari 61,2%.

Sebelumnya, Presiden Direktur PTFI Tony Wenas menegaskan pembahasan divestasi tambahan saham PTFI sebesar 10% menjadi 61,2% ke pemerintah melalui MIND ID, masih terus berlanjut.

Akan tetapi, Tony menggarisbawahi belum terdapat perkembangan yang bisa diungkapkan ke publik terkait dengan pelepasan saham PTFI tersebut. “Masih dibicarakan. Belum ada [perkembangan yang bisa disampaikan],” kata Tony kepada awak media di sekitar Jakarta Selatan, Rabu (27/8/2025).

Dalam kesempatan yang sama, Tony menjelaskan sudah pernah berdiskusi dengan pemerintah untuk memperpanjang IUPK PTFI selepas 2041. Langkah tersebut dilakukan, sebab masih terdapat potensi sumber daya mineral yang bisa dieksploitasi di tambang milik PTFI.

“Kalau enggak di-develop berarti

kontribusi kami kepada pemerintah yang sekitar US\$4 miliar per tahun itu berhenti, kontribusi kepada daerah sekitar US\$700 juta per tahun juga berhenti, employment 30.000 berhenti, semuanya berhenti,” ujar Tony.

Atas alasan itu, PTFI menegaskan berencana mengajukan perpanjangan IUPK agar potensi sumber daya yang tersedia masih dapat diproduksi dan kontribusi terhadap perekonomian Indonesia masih bisa berlanjut.

“Dan salah satu pemikirannya adalah bagaimana kalau sampai 2041 ditambah lagi sahamnya 10%, itu still under discussion, mudah-mudahan bisa tercapai kesepakatan,” tuturnya.

Sebelumnya, Mind ID) juga mengaku siap membeli tambahan 10 persen saham PTFI. Kesiapan terutama dari sisi dana. Saat ini, pemerintah memang tengah berusaha menjadi pemegang saham utama PTFI.

Meski telah siap namun tetap akan menunggu kebijakan Presiden Prabowo. Jika memang ada perintah untuk membeli maka akan dilakukan sebab anggaran sudah ada. Di satu sisi, saat itu proses divestasi saham dan perpanjangan kontrak PTFI masih belum rampung. Sebab masih ada evaluasi perpanjangan kontrak PTFI dari 2041 ke 2061.

Imbas Longsor

Longsor di tambang bawah tanah Grasberg Block Cave (GBC),

Tembagapura, Mimika, Papua Tengah, mengakibatkan produksi PTFI mengalami penurunan 70%. Direktur Jenderal Mineral dan Batu bara (Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Tri Winarno mengatakan, aktivitas produksi di GBC sementara berhenti.

“Sementara ini produksi berhenti di GBC. (Kapasitas produksi) turun, mungkin cuma (beroperasi) 30 persennya,” kata Tri dilansir kontan, Senin (15/9/2025).

Mengacu data Freeport, rata-rata produksi bijih pada 2024 mencapai 208.356 ton per hari. Dari total tersebut, GBC berkontribusi sekitar 133.800 ton per hari atau 64% dari kapasitas keseluruhan. Sementara tambang bawah tanah lainnya, yakni Deep Mill Level Zone (DMLZ) dan Big Gossan, masing-masing menghasilkan 64.900 ton dan 8.000 ton per hari.

Penurunan produksi ini terjadi di tengah upaya pencarian tujuh pekerja yang masih terjebak akibat longsor. “Belum (ketemu), masih diupayakan,” imbuhnya.

Saat ini, PTFI bekerja sama dengan Inspektur Tambang Kementerian ESDM, MIND ID, dan Freeport McMoRan untuk mempercepat proses pencarian dan pemulihan akses produksi.

Adapun insiden longsor terjadi pada Senin (8/9/2025) malam sekitar pukul 22.00 WIT di area Grasberg Block Cave (GBC) Extraction panel 28-301. Aliran material basah dalam jumlah besar menutup akses dari titik pengambilan produksi, sehingga membatasi jalur evakuasi tujuh pekerja yang terjebak. (han,ist/lut)